

# Pemetaan Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Status Kepegawaian Dalam Mendukung Pelayanan Publik Di Nabire, Papua Tengah

Fauzia Fajriyati<sup>1</sup>, Usman Arfan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Informatika, STMIK Pesat Nabire, Indonesia

Email: [fauziefajriyati@gmail.com](mailto:fauziefajriyati@gmail.com)<sup>1</sup>, [usmanarfanpesat@gmail.com](mailto:usmanarfanpesat@gmail.com)<sup>2</sup>

Alamat: Jl. Poros Samabusa, Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua 98816 *Korespondensi*  
*Korespondensi penulis:* [fauziefajriyati@gmail.com](mailto:fauziefajriyati@gmail.com)

**Abstract.** *This investigation endeavors to elucidate the spatial distribution of Civil Servants (ASN) in Nabire Regency, Central Papua, with a particular emphasis on their employment status and its implications for public service delivery. Underpinned by the pivotal role of ASN in governance and the provision of effective public services, this study seeks to address the challenges associated with the management of disparate spatial and non-spatial personnel data. Utilizing Geographic Information System (GIS) methodology, this research facilitates a nuanced analysis and visualization of ASN data, stratified by geographical location and employment status, including civil servants, government employees with work contracts, and contract workers. The findings underscore the significance of mapping ASN distribution in identifying regional disparities, particularly in remote and underdeveloped areas such as Nabire. Moreover, the efficacy of ArcMap software from the ArcGIS platform in generating precise ASN distribution maps is demonstrated, thereby informing evidence-based policy formulation. The study's implications highlight the necessity for a reassessment of ASN requirements to ensure the judicious and equitable appointment of government employees with work contracts and civil servants, ultimately enhancing public service provision.*

**Keywords:** *Central Papua; Civil Servants; Geographic Information System; Nabire; Public Services.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk memetakan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan status kepegawaian dalam mendukung pelayanan publik di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya peran ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan data kepegawaian yang tidak terintegrasi secara spasial dan non-spasial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Geografis (SIG), yang memungkinkan analisis dan visualisasi data ASN berdasarkan lokasi geografis dan jenis status kepegawaian seperti PNS, PKKK, dan tenaga kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan distribusi ASN sangat penting untuk mengidentifikasi ketimpangan dalam penyebaran ASN, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) seperti Nabire. Selain itu, penggunaan perangkat lunak ArcMap dari platform ArcGIS terbukti efektif dalam menghasilkan peta distribusi ASN yang akurat, yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pemetaan ulang kebutuhan ASN untuk memastikan pengangkatan PPPK dan PNS dilakukan secara tepat dan merata, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan.

**Kata kunci:** Papua Tengah; Pegawai Negeri Sipil; Sistem Informasi Geografis; Nabire; Pelayanan Publik.

## 1. PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang efektif dan efisien. Sebagai pilar utama birokrasi, keberadaan dan distribusi ASN yang merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi faktor penting dalam memastikan pemerataan pembangunan dan pelayanan [1]. Hal ini menjadi lebih krusial di wilayah-wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) seperti

Kabupaten Nabire di Provinsi Papua Tengah, yang memiliki tantangan geografis dan demografis tersendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menganalisis rasio status kepegawaian ASN secara lebih komprehensif dan berbasis data [2].

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan teknologi yang mampu mengintegrasikan data spasial dan non-spasial untuk analisis dan visualisasi peta tematik [3]. Dalam konteks pemetaan status kepegawaian, SIG memungkinkan pengolahan data yang mencakup lokasi geografis ASN, jenis status kepegawaian seperti PNS, PKKK, dan tenaga kontrak, serta distribusinya pada setiap satuan wilayah [4]. Salah satu perangkat lunak SIG yang paling banyak digunakan adalah ArcMap dari platform ArcGIS, yang menyediakan fitur-fitur analisis spasial yang lengkap. Pemanfaatan ArcMap dapat membantu menghasilkan peta distribusi ASN yang akurat dan mudah dipahami oleh para pengambil keputusan [5].

Namun demikian, permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan data kepegawaian di daerah seperti Nabire adalah tidak terintegrasinya data spasial dan non-spasial. Data ASN biasanya tersimpan dalam bentuk tabular atau dokumen administratif, tanpa adanya representasi visual berbasis wilayah. Kondisi ini menyulitkan proses identifikasi ketimpangan distribusi ASN berdasarkan status kepegawaiannya. Ketiadaan sistem yang mampu memetakan rasio ASN secara spasial menyebabkan kurangnya informasi penting bagi perumusan kebijakan tata kelola SDM sektor publik di daerah.

Sebagai solusi, pendekatan pemetaan berbasis SIG melalui perangkat ArcMap dapat digunakan untuk memvisualisasikan rasio status kepegawaian ASN secara lebih informatif [6]. Penggunaan SIG memungkinkan pemetaan data ASN dengan wilayah administratif, sehingga menghasilkan peta-peta tematik yang menampilkan konsentrasi ASN berdasarkan status kepegawaian pada tiap distrik atau kecamatan [7]. Visualisasi ini sangat membantu pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi, perencanaan penempatan ASN, serta penyusunan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) [8].

Penelitian sebelumnya telah banyak memanfaatkan SIG untuk keperluan pemetaan infrastruktur, sebaran penduduk, dan sektor pendidikan [9]. Namun, studi yang secara spesifik mengkaji pemetaan status kepegawaian ASN di Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire, masih sangat terbatas. Padahal, daerah ini menghadapi persoalan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang penting untuk dijawab melalui kajian ini.

Studi oleh N. Nirwana et al. (2019) berhasil memanfaatkan SIG untuk pemetaan distribusi guru di wilayah terpencil, membuktikan bahwa visualisasi spasial mampu memberikan gambaran ketimpangan yang lebih konkret [10]. Geografi dan kondisi sosial ekonomi Indonesia yang beragam menyebabkan kesenjangan regional yang signifikan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, dan antara bagian barat dan timur negara. Analisis spasial membantu mengidentifikasi perbedaan ini dan menginformasikan penempatan strategis pegawai negeri sipil untuk mengatasinya secara efektif [11]. Selain itu, S. Heri, D. Diyono, dan S. Deva (2018) telah menggunakan teknologi GIS untuk memungkinkan visualisasi data spasial, yang penting untuk memahami distribusi tenaga kerja pemerintah di berbagai wilayah di Indonesia Timur [12].

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dalam membentuk pengaplikasian teknologi SIG menggunakan ArcMap untuk memetakan rasio status kepegawaian ASN di Nabire secara spasial. Kajian ini menggabungkan data kepegawaian dengan peta wilayah administratif guna menghasilkan visualisasi yang mampu menjawab kebutuhan perencanaan ASN secara lebih akurat. Sampai saat ini, belum ditemukan penelitian yang melakukan analisis serupa di wilayah Papua Tengah, menjadikan penelitian ini sebagai pionir di bidangnya.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan rasio status kepegawaian ASN Kabupaten Nabire dengan memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis menggunakan perangkat lunak ArcMap. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyajikan data visual yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan ASN secara lebih merata dan berkelanjutan.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya data spasial dalam proses perencanaan dan distribusi ASN, terutama di daerah dengan tantangan geografis yang signifikan seperti Nabire. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis spasial di sektor kepegawaian serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi birokrasi daerah.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Studi oleh B. Gunawan et al. (2023) secara khusus membahas integrasi Sistem Informasi Geografis (GIS) dalam pemberian layanan atau kesenjangan penelitian terkait dalam mengoptimalkan sumber daya manusia dalam sektor publik. Namun, ini menekankan pentingnya mengintegrasikan sumber daya manusia dan teknologi dalam manajemen publik untuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan efisiensi. Studi ini menyoroti perlunya

kolaborasi dan analisis data, yang mungkin relevan dengan aplikasi GIS, tetapi tidak secara langsung mencakup kesenjangan penelitian terkait GIS [13].

Studi oleh Rita Uchenna Attah et al. (2024) mengakui bahwa GIS dan analisis data meningkatkan pengambilan keputusan sektor publik, tantangan tetap ada, termasuk masalah kualitas data dan resistensi terhadap perubahan. Ini menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut tentang mengoptimalkan sumber daya manusia dalam layanan publik, karena implementasi GIS yang efektif dapat mengarah pada meningkatkan alokasi sumber daya dan strategi tanggap darurat. Mengatasi kesenjangan ini melalui kemajuan teknologi dan model tata kelola kolaborasi sangat penting untuk memaksimalkan manfaat GIS dalam operasi sektor publik [14].

Studi oleh Adamu Sa'ad Madaki et al. (2024) mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang signifikan dalam implementasi integrasi TI dalam organisasi sektor publik, terutama mengenai optimalisasi sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Meskipun tidak secara khusus membahas Sistem Informasi Geografis (GIS), ini menekankan perlunya teknologi inovatif untuk meningkatkan produktivitas dan pemberian layanan. Kerangka kerja yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan untuk menghubungkan solusi modern, seperti GIS, dapat menyebabkan kendala dalam operasi organisasi, terutama di negara-negara berkembang yang menghadapi kesenjangan besar [15].

Dalam beberapa tahun terakhir, integritas Sistem Informasi Geografis (GIS) dalam pemberian layanan publik telah menyoroti kesenjangan penelitian yang signifikan, terutama dalam optimalisasi sumber daya manusia dalam sektor publik. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa teknologi GIS dapat meningkatkan efisiensi layanan publik dengan memetakan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, masih ada kurangnya analisis komprehensif mengenai status kepegawaian personel ini, yang sangat penting untuk administrasi publik yang efektif. Selain itu, teknik analisis spasial belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memahami implikasi geografis dari distribusi kepegawaian di daerah seperti Nabire, Papua Tengah. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan menggunakan ArcGIS untuk memberikan pemetaan rinci ASN berdasarkan status kepegawaian mereka, sehingga berkontribusi pada optimalisasi pemberian layanan publik dan proses pengambilan keputusan di daerah tersebut. Kebaruan terletak pada fokus khusus pada Nabire, yang telah kurang diteliti dalam konteks ini.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian terapan (*applied research*) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran spasial mengenai distribusi ASN berdasarkan status kepegawaian di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Sistem Informasi Geografis (SIG) digunakan sebagai alat utama dalam visualisasi data dan analisis spasial.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Waktu pelaksanaan penelitian adalah antara bulan Januari hingga Mei 2025, yang mencakup proses pengumpulan data, pengolahan, analisis, hingga visualisasi peta dalam ArcMap. Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama antara lain, Data Spasial, Peta administrasi Kabupaten Nabire dalam format shapefile (.shp), yang peroleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG) atau instansi pemerintah daerah yang relevan. Data Non-Spasial (Atribut), Data jumlah ASN berdasarkan status kepegawaian (PNS, PPPK, Kontrak) per distrik/kecamatan, yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nabire.

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan Data, Mengumpulkan peta administrasi wilayah dan data ASN berdasarkan status kepegawaian per distrik. Integrasi Data Spasial dan Non-Spasial, Data tabular ASN diolah dalam Microsoft Excel dan kemudian di-join dengan peta digital wilayah melalui atribut kode distrik/kecamatan pada perangkat lunak ArcMap. Analisis Rasio Status Kepegawaian, Dilakukan perhitungan rasio status kepegawaian untuk masing-masing distrik, seperti:

$$Rasio\ PNS = \frac{Jumlah\ PNS}{Total\ ASN} + 100\%$$

$$Rasio\ PPPK = \frac{Jumlah\ PPPK}{Total\ ASN} + 100\%$$

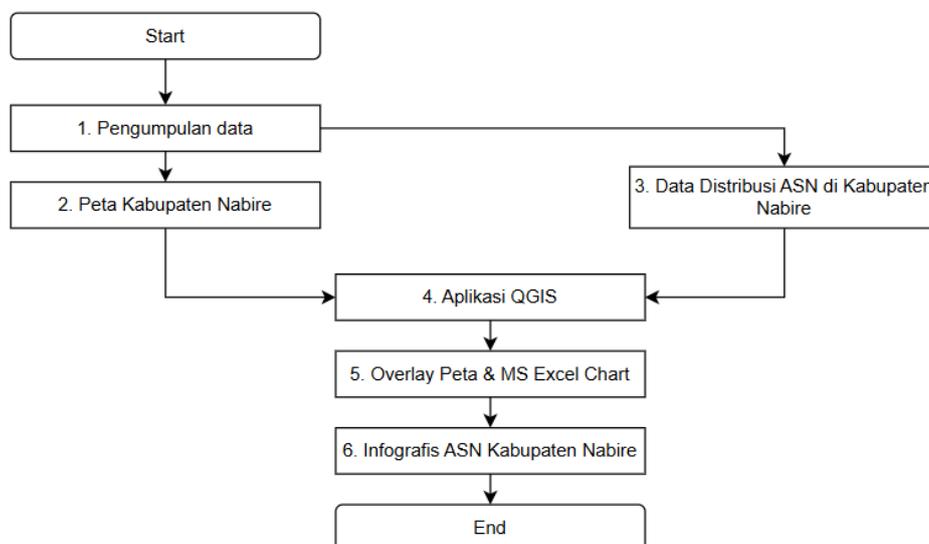
$$Rasio\ Tenaga\ Kontrak = \frac{Jumlah\ Tenaga\ Kontrak}{Total\ ASN} + 100\%$$

Selanjutnya Pembuatan Peta Tematik (Thematic Mapping), Menggunakan fitur *Symbology-Graduated Colors* pada ArcMap untuk menggambarkan variasi rasio status ASN berdasarkan Klasifikasi tertentu (misal: sangat rendah, rendah, sedang tinggi, sangat tinggi). Interpretasi dan Analisis, Menganalisis sebaran spasial dari masing-masing status ASN dan mengidentifikasi pola konsentrasi atau ketimpangan distribusi ASN di tiap wilayah administratif.

Perangkat Lunak, ArcMap 10.x, Microsoft Excel, dan QGIS (sebagai pendukung jika dibutuhkan). Hardware: Komputer/laptop dengan spesifikasi gratis memadai untuk menjalankan aplikasi SIG. Dokumen Penunjang: Metadata peta, dokumen kebijakan kepegawaian daerah, serta dokumen penunjang dari BKD. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif, dengan pendekatan visual melalui peta tematik. Analisis ini bertujuan untuk mengungkapkan distribusi dan ketimpangan rasio status kepegawaian ASN serta menyediakan bukti visual yang mendukung pengambilan keputusan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data, ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Ketimpangan distribusi ASN antar instansi atau wilayah adalah masalah utama yang sering dihadapi daerah seperti Nabire. Ada kemungkinan bahwa satu instansi memiliki jumlah ASN yang cukup, sementara yang lain memiliki jumlah ASN yang kurang, terutama di bidang-bidang administrasi, kesehatan, dan pendidikan. Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan ASN di lapangan berdampak langsung pada kualitas publik yang biasanya lambat, tidak efisien, atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah membuat kebijakan penempatan ASN yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Adapun langkah-langkah dalam pengerjaan penelitian ini, sebagai berikut:



**Gambar 1. Alur Kerja (Workflow)**

Proses pemetaan distribusi ASN di Kabupaten Nabire dimulai dari tahap awal yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini, informasi mengenai jumlah ASN, status kepegawaian (seperti PNS, PPPK, dan Tenaga Kontrak), serta lokasi penempatan masing-masing ASN dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, seperti instansi pemerintahan atau lembaga kepegawaian daerah. Data ini menjadi fondasi utama dalam proses analisis lebih lanjut.

**Tabel 1. Dapo Dikdasmen**

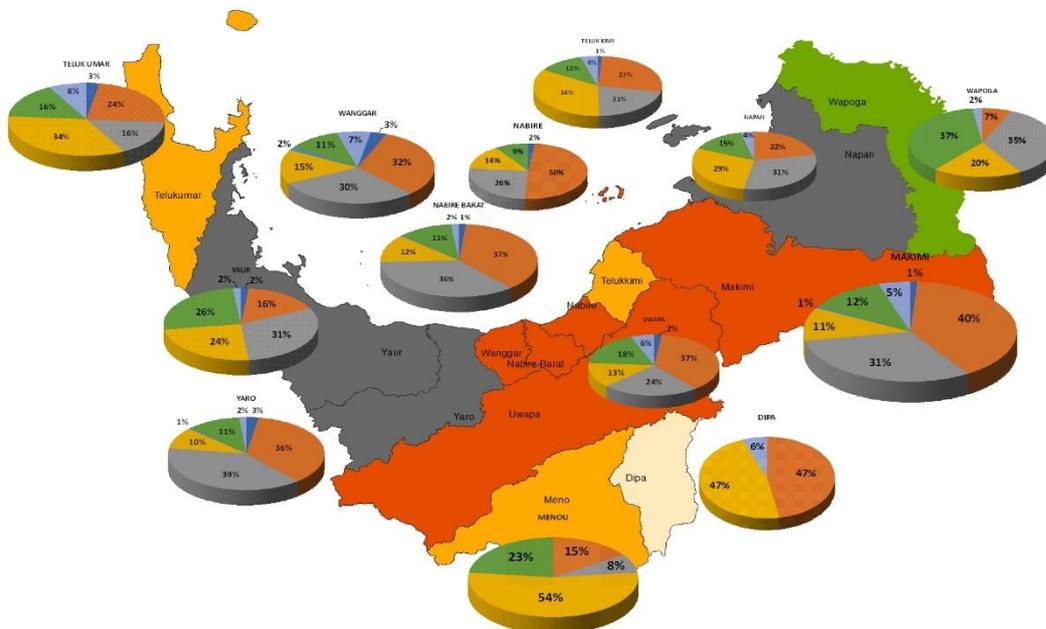
No.	Nama Distrik	CPNS	PNS	PPPK	Tenaga Honorer				Jumlah
					Guru Honor Sekolah	Honor Daerah TK.I Provinsi	Honor Daerah TK.II Kab/Kota	Tenaga Honor Sekolah	
1.	Dipa	0	8	0	8	0	0	1	17
2.	Makimi	2	74	58	20	1	22	9	186
3.	Menou	0	2	1	7	0	3	0	13
4.	Nabire	26	775	404	224	3	142	0	1547
5.	Nabire Barat	4	109	105	36	1	33	5	293
6.	Napan	0	12	17	16	0	8	2	55
7.	Teluk Kimi	3	75	59	95	0	32	12	276
8.	Teluk Umar	1	9	6	13	0	6	3	38
9.	Uwapa	2	39	25	14	0	19	6	105
10.	Wanggar	6	58	54	28	3	20	13	182
11.	Wapoga	0	3	16	9	0	17	1	46
12.	Yaro	5	72	77	19	1	22	3	199
13.	Yaur	1	10	19	15	0	16	1	62

Aparatur Sipil Negara atau sering disebut ASN terdiri dari 4 jenis status kepegawaian, diantaranya adalah CPNS, PNS, PPPK dan Tenaga Honorer. Tenaga Honorer dibagi lagi menjadi 4 jenis yaitu Guru Honorer Sekolah, Honor Daerah TK.I Provinsi, Honor Daerah TK.II Kab/Kota dan Tenaga Honor Sekolah. ASN yang termasuk dalam CPNS hanya bisa diangkat menjadi PNS sedangkan Tenaga Honorer bisa diangkat menjadi PNS atau PPPK melalui tes seleksi atau tetap menjadi tenaga honorer sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. ASN dengan kategori PPPK juga bisa diangkat menjadi PNS dengan syarat harus lulus tes seleksi menjadi CPNS dan diangkat menjadi PNS.

Setelah data diatas telah dikumpulkan, tahap berikutnya adalah menyimpan peta Kabupaten Nabire. Peta ini berfungsi sebagai dasar untuk visualisasi spasial yang akan menunjukkan distribusi ASN secara geografis. Peta biasanya dikirim dalam format digital

shapefile (SHP). Data distribusi yang sudah diklasifikasikan juga dipersiapkan, yang menunjukkan rincian distribusi ASN di setiap distrik Kabupaten Nabire. Pada tahap ini data diolah sehingga dapat diintegrasikan dengan peta digital yang telah disiapkan sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah penggunaan aplikasi QGIS yaitu perangkat lunak pemetaan geografis *open source*. Data distribusi ASN ditambahkan ke peta Kabupaten Nabire ke dalam QGIS, memungkinkan visualisasi spasial yang jelas tentang bagaimana ASN tersebar di Kabupaten Nabire.

Data kuantitatif seperti jumlah ASN per wilayah, persentase status kepegawaian dan indikator lainnya ditampilkan dalam grafik dan tabel yang dibuat menggunakan Microsoft Excel setelah pemetaan di QGIS selesai. Penyusunan infografis tentang distribusi ASN di Kabupaten Nabire adalah hasil akhir dari seluruh proses ini. Infografis ini menggabungkan elemen visual dari peta dan grafis hingga menjadi alat yang informatif dan menarik untuk menjelaskan tentang kondisi sebaran ASN kepada masyarakat, pengambilan kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pemetaan selesai setelah infografis dibuat, proses ini dapat menghasilkan data yang dapat digunakan untuk membantu perencanaan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten tersebut.



**Gambar 2. Peta Distribusi ASN di Kabupaten Nabire**

Diagram lingkaran pada gambar diatas menggambarkan distribusi persentase dari berbagai jenis status kepegawaian di sektor pendidikan, khususnya di sekolah. Ini dapat mencakup guru dan tenaga kependidikan lain, tergantung konteksnya. Setiap warna dalam diagram menunjukkan jenis status kepegawaian atau sumber dana yang berbeda.

Warna biru tua menandai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Mereka yang lolos seleksi penerimaan PNS disebut CPNS, tetapi mereka masih menjalani masa percobaan selama satu tahun. Selama masa percobaan ini, mereka belum menerima hak penuh seperti PNS dan hanya menerima sekitar 80% dari gaji pokok. CPNS akan diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) setelah masa percobaan selesai dan keputusannya diterima dan status kepegawaian ini ditandai dengan warna oranye setelah. PNS adalah pegawai tetap pemerintah dengan jaminan hukum dan sosial, seperti gaji tetap, tunjangan, dan pensiun, dan jenjang karier yang jelas. Mereka yang bekerja di bidang pendidikan biasanya menginginkan status ini, yang merupakan yang paling stabil.

Selain itu, ada PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang digambarkan dengan warna abu-abu. PPPK adalah pegawai kontrak pemerintah yang menerima gaji dan tunjangan serupa PNS, namun tidak memiliki hak atas pensiun dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan masa kontrak tertentu. Meski mendapat gaji dari APBN, status mereka tetap non-permanen.

Ada juga Guru Honorer Sekolah, yang diberi warna kuning. Di kebanyakan sekolah, guru honorer dipekerjakan langsung oleh sekolah dan dibayar melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Status mereka sangat bergantung pada kebijakan internal sekolah karena mereka tidak bekerja langsung dengan pemerintah. Dibandingkan dengan karyawan yang dipekerjakan secara permanen, kondisi kerja mereka biasanya lebih rentan. Tenaga Honor Sekolah yang diberi warna ungu muda. Tenaga honor ini termasuk orang yang tidak bekerja sebagai guru, seperti petugas tata usaha, penjaga sekolah, atau petugas kebersihan yang diangkat dan dibayar langsung oleh sekolah. Mereka tidak memiliki status pegawai negeri resmi, dan kondisi kerja mereka sangat fleksibel dan bergantung pada dana sekolah.

Tenaga honorer yang diangkat oleh pemerintah provinsi dan dibiayai melalui APBD tingkat provinsi ditunjukkan dengan warna biru muda di Honor Daerah Tingkat I (Provinsi). Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan guru atau guru lokal, tetapi mereka tidak berstatus tetap dan tidak memiliki hak pensiun. Sementara Penghargaan untuk Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) ditunjukkan dengan warna hijau. Ini adalah karyawan honorer yang dipekerjakan oleh pemerintah kabupaten atau kota dan dibayar melalui APBD setempat. Mereka juga tidak memiliki jaminan jangka panjang, seperti honorer provinsi.

Pada peta sebaran ASN di Kabupaten Nabire memperlihatkan variasi status kepegawaian di setiap distrik. Melalui diagram lingkaran yang ditempatkan pada masing-masing wilayah, dapat dilihat proporsi atau persentase jumlah ASN berdasarkan status tersebut. Setiap distrik

menunjukkan kecenderungan yang berbeda-beda, ada yang di dominasi oleh Tenaga PNS, ada pula yang masih sangat bergantung pada tenaga honor sekolah maupun yayasan. Variasi ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana distribusi ASN di wilayah Kabupaten Nabire.

Guru honorer sekolah adalah kelompok terbesar di Teluk Umar dengan 34%, diikuti oleh PNS sebesar 24%, dan PPPK dan honor daerah tingkat II masing-masing menyumbang 16%. Tenaga honor sekolah hanya 8%, sementara CPNS hanya 3%. Wanggar memiliki komposisi yang kuat di PNS (32%) dan PPPK (30%). Guru honorer sekolah menyumbang 15%, tenaga honor sekolah 7%, honor daerah tingkat II 11%, dan CPNS 3%. Di Nabire, PNS mendominasi dengan 50%, disusul PPPK dengan 26%, guru honorer sekolah dengan 14%, honor daerah dengan 9%, dan CPNS dengan 2%.

Di Nabire Barat, ada distribusi yang hampir seimbang antara PNS (37%) dan PPPK (36%), diikuti oleh guru honorer sekolah (12%), honor daerah tingkat II (11%), CPNS (2%), dan honor daerah tingkat I (1%). Di Teluk Kimi, guru honorer sekolah adalah kelompok terbesar dengan 34%. Disusul oleh PNS pada 27%, PPPK pada 21%, honor daerah pada 12%, tenaga honor sekolah pada 5%, dan CPNS pada 1%. Napan memiliki proporsi PPPK tertinggi sebesar 31%, diikuti oleh PNS sebesar 29%, guru honorer sebesar 20%, honor daerah tingkat II sebesar 15%, dan honor daerah tingkat I sebesar 22%.

Distrik Wapoga bergantung pada honor daerah tingkat II sebesar 37% dan PPPK sebesar 35%. Guru honorer menyumbang 20%, PNS hanya 7%, dan CPNS hanya 2%. Jumlah PNS di Makimi adalah 40% dan PPPK adalah 31%, dengan guru honorer 11%, honor daerah tingkat II 12%, honor daerah tingkat I 5%, dan CPNS 1%. Di Uwapa, PNS sebesar 37%, PPPK sebesar 24%, guru honorer sekolah sebesar 13%, honor daerah tingkat II sebesar 18%, honor daerah tingkat I sebesar 6%, dan CPNS sebesar 2%. Menou atau Meno bergantung pada guru honorer sekolah, yang mencapai 54%, honor daerah kabupaten 23%, PNS 15%, dan tenaga honor sekolah 8%.

Di Dipa, honor daerah tingkat I hanya 6%, sedangkan PNS dan guru honorer sekolah masing-masing sebesar 47%. Komposisi Yaur terdiri dari 31% PPPK, 26% honor daerah tingkat II, 24% guru honorer sekolah, 16% PNS, dan 2% CPNS dan honor daerah tingkat I. Terakhir, Yaro terdiri dari 39% PPPK, diikuti oleh 36% PNS, 11% guru honorer, 3% tenaga honor sekolah, 2% CPNS, dan 1% honor daerah tingkat II.

Secara keseluruhan, distrik seperti Nabire dan Makimi mengandalkan PNS sebagai kekuatan utama, sementara distrik seperti Menou, Teluk Umar, dan Wapoga menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap tenaga honorer dan PPPK. Hal ini menggambarkan ketimpangan distribusi status kepegawaian di wilayah-wilayah tersebut.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil analisis tentang sebaran status kepegawaian guru di Kabupaten Nabire menunjukkan bahwa distribusi guru berdasarkan status kepegawaiannya tidak merata. Di distrik seperti Nabire, Makimi, Yaro didominasi oleh guru berstatus PNS dan PPPK, sementara di distrik seperti Menou dan Teluk Umar masih sangat bergantung pada guru honor sekolah. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam soal pemerataan status dan penyebaran tenaga pendidik, agar kualitas pendidikan dapat terjamin secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Nabire.

Keberagaman status kepegawaian memungkinkan proses pendidikan tetap berjalan meskipun distribusi PNS belum merata. Guru honorer tetap menjadi penopang penting, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, meningkatnya jumlah PPPK di beberapa distrik menjadi tanda positif bahwa program pemerintah dalam pengangkatan tenaga kontrak menjadi pegawai formal sudah mulai berdampak.

Ketimpangan status ini menciptakan kesenjangan kesejahteraan dan motivasi di kalangan guru. Guru honorer cenderung memiliki penghasilan rendah dan akses pelatihan yang terbatas, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran. Di beberapa pergantian guru juga ada yang mengganggu stabilitas pendidikan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan pemetaan ulang kebutuhan guru per distrik agar pengangkatan PPPK dan PNS bisa dilakukan secara tepat sasaran. Guru non-ASN juga perlu diberikan insentif tambahan dan akses pelatihan yang merata untuk meningkatkan kualitas dan motivasi kerja mereka. Disisi lain, kolaborasi antara pemerintah daerah dan yayasan pendidikan harus diperkuat untuk menjamin bahwa seluruh tenaga pendidik, tanpa memandang status kepegawaian, mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Monitoring berkala juga diperlukan agar perencanaan dan kebijakan dapat terus disesuaikan dengan dinamika lapangan.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] U. Madjid, “Quality of Public Services: The Role of State Civil Apparatus in Realizing Good Governance,” *Journal of ecohumanism*, vol. 3, no. 7, 2024, doi: 10.62754/joe.v3i7.4590.
- [2] Ch. M. Lewerissa and E. Edyanto, “Contested local power in influencing regional development planning in Nabire Papua, Indonesia,” *Otoritas: jurnal ilmu pemerintahan*, vol. 14, no. 2, pp. 362–376, 2024, doi: 10.26618/ojip.v14i2.15334.
- [3] E. Dodsworth, “Geographic Information Systems,” Elsevier BV, 2024. doi: 10.1016/b978-0-323-95689-5.00126-7.
- [4] F. Ernst, S. Erdoğan, and Y. Bayram, “Human resource management using geographic information systems (gis): an example from turkish land registry directorates,” *International Journal of Engineering*, vol. 4, no. 2, pp. 71–77, 2019, doi: 10.26833/IJEG.450571.
- [5] B. Seeger and P. Widmayer, “Geographic Information Systems”, doi: 10.1201/9781420035179.ch55.
- [6] “Spatial Informatics Group (SIG)\_asdf,” 2023, doi: 10.5281/zenodo.10171574.
- [7] A. Ahmed, K. Kheraj, A. Ali, K. S. S. Rani, and M. Meenaxy, “Geographical Distribution of Healthcare Facilities in Poonch District: An Evaluation through GIS,” *Journal of mountain research*, vol. 19, no. 1, 2024, doi: 10.51220/jmr.v19-i1.38.
- [8] P. Ogunmodede, “Geovisualization and geovisual analytics for smart city planning and design,” 2023, doi: 10.14293/pr2199.000545.v1.
- [9] R. Sebah, “Analysis of the characteristics of the spatial distribution of secondary education schools in the city of Dujail using GIS,” *Journal of STEPS for humanities and social sciences*, vol. 1, no. 3, 2022, doi: 10.55384/2790-4237.1095.
- [10] N. Nirwana, A. Vatesia, and F. Utama, “Mapping Teacher Distribution Analysis with Digitation Technology Implementation to Improve Education Management in Bengkulu City,” pp. 197–202, 2019, doi: 10.2991/ICETEP-18.2019.49.
- [11] M. Habibi, “Ketimpangan Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah,” *Multiverse*, vol. 3, no. 1, pp. 59–63, 2024, doi: 10.57251/multiverse.v3i1.1412.
- [12] S. Heri, D. Diyono, and S. Deva, “Geospatial Information Utilization in Indonesian Local Government,” 2018, doi: 10.1109/ICSTC.2018.8528707.
- [13] B. Gunawan, B. M. Ratmono, D. Kurniasih, and P. I. Setyoko, “Human Resources and Technology Integration in Effective Public Management,” 2023, doi: 10.30589/pgr.v7i3.782.
- [14] R. U. Attah, B. M. P. Garba, I. Gil-Ozoudeh, and O. Iwuanyanwu, “Leveraging geographic information systems and data analytics for enhanced public sector decision-making and urban planning,” *Magna Scientia Advanced Research and Reviews*, vol. 12, no. 2, pp. 152–163, 2024, doi: 10.30574/msarr.2024.12.2.0191.
- [15] A. S. Madaki, K. Ahmad, and D. Singh, “Information technology integration implementation in public sector organizations: Exploring challenges, opportunities, and future trends,” *Information Development*, 2024, doi: 10.1177/02666669241255661.